

**PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN UNGGULAN KOMPETITIF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**ANALISIS SPASIAL DAN KELEMBAGAAN EKONOMI
PERDESAAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Oleh:

1. Dr. Sukanto, S.E., M.Si (NIDN: 0025037404)
2. Drs. Zulkarnain Ishak, M.A (NIDN: 0007065401)
3. Drs. Syirod Saleh, M.Si (NIDK

Dibiayai dari:
Anggaran PNBP Universitas Sriwijaya

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN UNSRI

1. Judul Penelitian : Analisis Spasial dan Kelembagaan Ekonomi
Perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan
2. Bidang : Ilmu Ekonomi
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Dr. Sukanto, S.E., M.Si
 - b. Jenis kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197403252009121001
 - d. NIDN : 0025037404
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - f. Jabatan Struktural : Dosen
 - g. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 - i. Alamat : Kampus FE Unsri Inderalaya, Jl. Plg- Prabumulih
 - j. No. Tlp/Fax : (0711) 580964/580231
 - k. Email : soekanto0813@fe.unsri.ac.id
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 Orang
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Sumatera Selatan
6. Waktu Penelitian : 1 (satu) Tahun
7. Hasil yang ditargetkan : Internasional Scopus/Prosiding/Publikasi
Media Massa (Surat Kabar)
8. Biaya : Rp.74.539.000,-

Inderalaya, 28 Desember 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si
NIP. 196812241993031002

Dr. Sukanto, S.E, M.Si
NIP. 197403252009121001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Prof. Dr.Ir. H. Muhammad Said, M.Sc
NIP. 196108121987031003

IDENTITAS

1. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN : 0025037404
2. Nama Peneliti : Dr.Sukanto, S.E., M.Si
3. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.1/Asisten Ahli
4. Email Pengusul : soekanto0813@fe.unsri.ac.id
- ID Scopus :
- ID Sinta : 6100225
- h-index : 1
- Riwayat Penelitian./Publikasi :

No.	Tahun	Penelitian dan Publikasi	Keterangan
1	2020	Can Increased Transfer Fund Efficiency Contribute to Poverty in South Sumatra, Indonesia. SEABC Conference. 2019	Penulis Pertama
2	2018	Specific Allocation Funds, Economic Growth, and Unemployment: A Case Study In Banten Province, Indonesia. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 8, Issue 9, September 2018. ISSN 2250-3153.	Penulis Pertama
3	2014	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. http://eprints.unsri.ac.id/4699/1/JURNAL_5-Azwardi_%26_Sukanto_vol12_no1_2014.pdf	Penulis Pertama

2. Identitas Anggota Pengusul

1. NIDN : 0017055602
2. Nama Peneliti : Drs. Syirod Saleh, M.Si
3. Pangkat/Jabatan : Pembina/Lektor Kepala
4. Email Pengusul : -
- ID Scopus : -
- ID Sinta : -
- h-index : -
- Riwayat Penelitian./Publikasi :

No.	Tahun	Penelitian dan Publikasi	Keterangan
1	2018	Determinan pendapatan added worker pada wanita menikah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 16(1) Desember 2018	Penulis ketiga
2	2017	Efisiensi belanja adminitrasi pemerintah Kota Palembang: Pendekatan Stochastic Frontier Analyis. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 15(2) Desember 2017.	Penulis kedua

3. Identitas Anggota Pengusul

1. NIDN : 0212057205
2. Nama Peneliti : Drs. Zulkarnain Ishak, M.A
3. Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.I/Lektor Kepala
4. Email Pengusul : ishakzul@gmail.com
ID Scopus : -
ID Sinta : 6118874
h-index : -
Riwayat Penelitian./Publikasi :

No.	Tahun	Penelitian dan Publikasi	Keterangan
1	2020	Can Increased Transfer Fund Efficiency Contribute to Poverty in South Sumatra, Indonesia. SEABC Conference. 2019	Penulis Ketiga
2	2019	The Performance and Strategy of Indonesian's Fisheries: A Descriptive Review. International Journal of Economics and Financial Issues 9 (1), 31-36: 2019	Penulis Pertama
3	2017	Pattern of Demand For Money. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business 1 (3), 267-276: 2017	Penulis Pertama
4	2016	Determinants And Export Competitiveness Of Coffee: Comparison Between Indonesia And Viet Nam. Malaysia Indonesia International Conference on Economics, Management. 2016	Penulis Pertama

4. Identitas Usulan

1. Rumpun Ilmu : Ekonomi
2. Bidang Fokus Penelitian : Sosial, Ekonomi, Humaniora, Semi
3. Tema Penelitian : Kajian Penguatan Modal Sosial
4. Topik Penelitian : Pengentasan Kemiskinan dan Kemandirian
5. Judul Penelitian : Analisis Spasial dan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan
6. Status Tingkat Kesiapsertaan : Pembuktian Akan Konsep Fungsi dan/atau Karakteristik penting Secara analitik dan Ekperimental
7. Target yang Ingin Dicapai : Internasional Scopus/Prosiding/ Publikasi Media Massa (Koran)
8. Skema Penelitian : Unggulan Kompetitif
9. Tahun Usulan dan Lama Penelitian : 2020, 1 Tahun
10. Biaya yang Diusulkan : Rp. 74.539.000,-
11. SBK Penelitian : Riset Terapan
12. Total Biaya yang Diterima : Rp.--

Lembaga Pengusul

13. Nama Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Ekonomi
14. Sebutan Jabatan Unit : -
15. Nama Pimpinan : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
16. NIP Pimpinan : 196812241993031002

Ringkasan

Perdesaan menjadi isu sentral sejak satu dekade terakhir, pemerintah sadar bahwa pembangunan selama ini cenderung bersifat urban bias sehingga perdesaan menjadi termarjinalkan. Hal ini terlihat sebagian desa menjadi kantong kemiskinan sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Penelitian ini bertujuan memotret perkembangan desa sejak adanya dana transfer ke desa melalui dana desa di Provinsi Selatan. Variabel dalam penelitian yaitu dana desa bidang infrastruktur, tingkat kemiskinan dan indeks desa membangun. Analisis menggunakan menggunakan model *geographically weighted regression* (GWR), local Indicator Spatial Analysis (LISA) dalam menganalisis spasial perekonomian desa sedangkan aspek kelembagaan dianalisis menggunakan model MACTOR.

Keywords: dana desa, ekonomi perdesaan, indeks desa membangun, locally weighted regression, LISA, Mactor.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
IDENTITAS PENELITIAN.....	ii
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
II. LITERATUR REVIEW	6
II.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	7
II.2 Kemiskinan	9
II.3 Kelembagaan	11
II.4 Penelitian Terdahulu	12
II.5 Peta Jalan.....	13
II.6 Kerangka Pikir.....	14
III. METODOLOGI PENELITIAN	15
III.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	15
III.2 Jenis dan Sumber Data	15
III.3 Teknik Analisis	16
III.4. Definisi Operasional Variabel	21
IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	22
V. RENCANA ANGGARAN BIAYA	23
VI. JADWAL	25
DAFTAR PUSTAKA	26

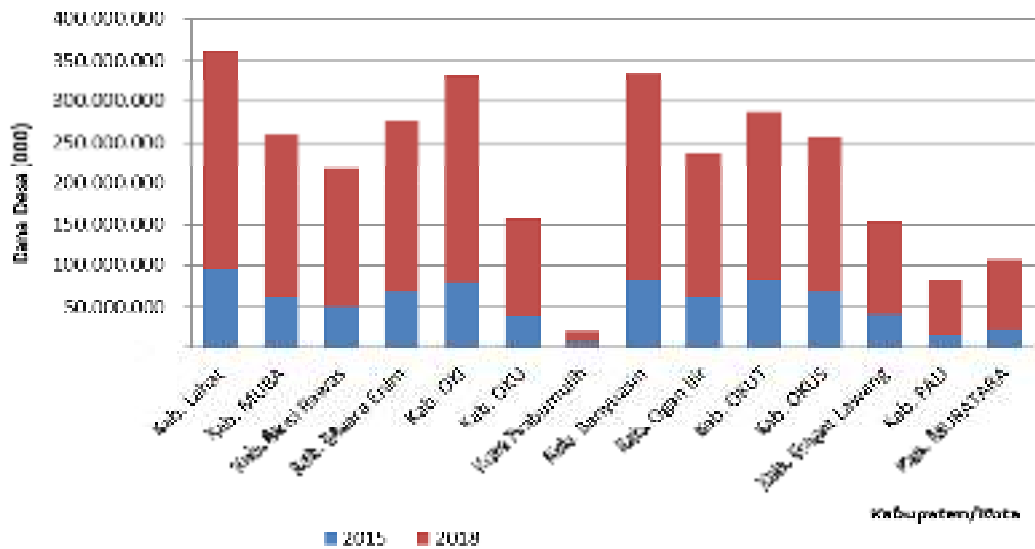
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang pelik yang dihadapi oleh setiap negara khususnya di negara berkembang. Pada aras global, agenda pengentasan kemiskinan telah dilakukan sejak lama, dan kesadaran akan pentingnya mereduksi kemiskinan tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Namun masalah kemiskinan belum juga tuntas. Masih pada aras yang sama, akhirnya negara-negara anggota PBB kembali menuangkan kesepakatan dalam Sustainability Development Goals (SDGs).

Mengacu pada agenda global tersebut pemerintah Indonesia pun menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Kebijakan dan program diluncurkan dari masa ke masa untuk menanggulangi kemiskinan, namun angka kemiskinan seperti permainan injit-injit semut, terkadang turun dengan cepat namun kembali melambat bahkan meningkat sangat tajam. Salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang diyakini mampu mengerus kemiskinan adalah mekanisme dana transfer pusat ke daerah melalui dana desa.

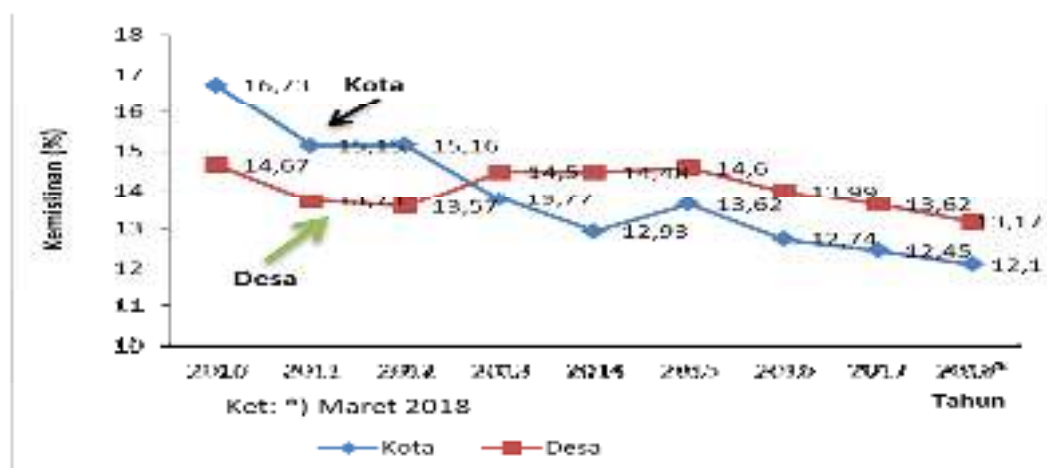
Keadaan tersebut terjadi pula pada Provinsi Sumatra Selatan, data publikasi Kemenkeu menunjukkan dana desa yang dialokasikan ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 rata-rata sebesar Rp 55,36 miliar dan meningkat menjadi Rp 164,96 miliar atau meningkat sebesar 32,15%. Pada tahun 2018 kabupaten dengan dana desa terbesar ditempati Kabupaten Lahat yaitu sebesar Rp 265,99 miliar, kemudian disusul oleh Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 254,67 miliar (Gambar 1).



Gambar 1. Jumlah dana desa menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumsel Tahun 2015 dan 2018

Sumber: DJPK, 2019

Peningkatan dana transfer ke daerah dan desa tidak sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Faktor kesulitan geografis dan variasi sumber mata pencaharian atau adanya perbedaan karakteristik wilayah (Demurger 2001) dapat berdampak pada kurang efisiennya dana transfer. Gambar 2 menunjukkan tren penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan.

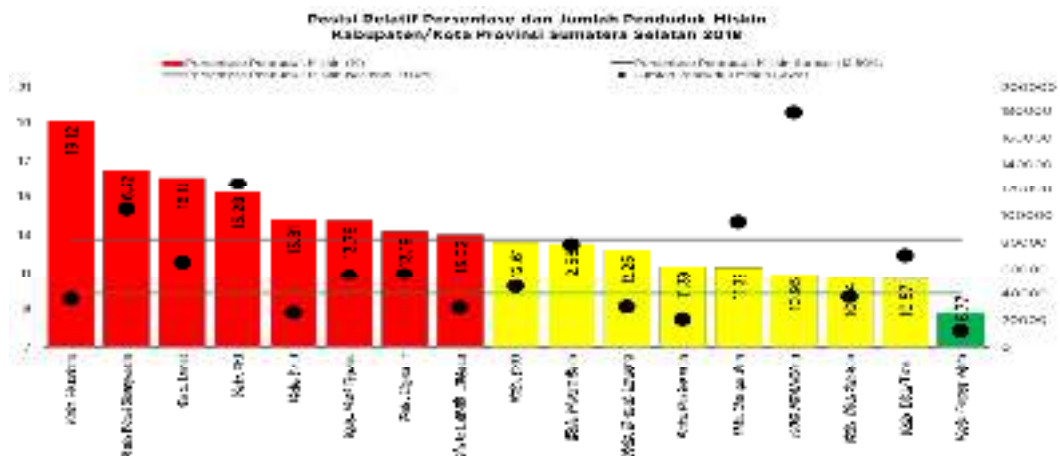


Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumsel Tahun 2010-2018

Sumber: BPS, 2019

Dilihat dari dekotomi desa-kota, pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan di perkotaan sebesar 16,73% sedangkan di perdesaan sebesar 14,67%. Namun memasuki tahun 2013, fenomena kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan sedangkan di perkotaan menunjukkan penurunan sehingga persentase kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. *Gap* kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih terlihat sampai dengan tahun 2018. Ironinya, dana desa mengalami peningkatan yang fantastis.

Dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa dan pembangunan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten Musi Rawas Utara menempati peringkat pertama dengan persentase kemiskinan tertinggi (19,12%), Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan belum efektif sehingga belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2018. Sumber: TNP2K, 2019

Hasil capaian pembangunan yang kurang optimal dapat pula disebabkan oleh ketidakefisienan kelembagaan misalnya maraknya korupsi, pemburu keuntungan pribadi atau rente seeking yang berdampak pada tingginya biaya transaksi seperti diungkapkan oleh Jaya (2010). Demikian pun hasil kajian dari WEF (2015) menyatakan bahwa aspek kelembagaan merupakan salah satu faktor

pembentuk daya saing sebuah negara. Institusi publik yang baik akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Bila politiknya kotor, pemerintah yang tidak peka, birokrasi lamban dan banyak mengutip pungutan dan lembaga penegak hukum tidak bersih maka kehidupan masyarakatnya akan buruk. Untuk itu, satu-satunya jalan yaitu memperbaiki kinerja lembaga-lembaga yang ada (Acemoglu dan Robinson 2012).

Dalam konteks desentralisasi, peran kelembagaan sangat menentukan keberhasilan kinerja pembangunan. Kelembagaan yang efisien salah satunya ditunjukkan oleh rendahnya biaya transaksi, dalam konteks pelayanan sektor publik biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi biaya input, biaya proses dan output. Biaya input dapat ditelusuri dari berapa besar sumber daya yang perlu dialokasikan untuk memberikan pelayanan. Kemudian biaya proses dan output tercermin dari rendahnya biaya prosedur-prosedur pengurusan perizinan (pendeknya mata rantai birokrasi). Data publikasi KPPOD (2011) menunjukkan hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki biaya transaksi yang tinggi.

1.2 Masalah Penelitian

Masalah heterogenitas dalam pembangunan wilayah perdesaan sering kali diabaikan dalam pengentasan kemiskinan. Selalu muncul anggapan bahwa problematika kemiskinan dapat diatasi dengan kebijakan penganggaran melalui mekanisme transfer pusat ke daerah dan desa seperti dana desa dan dana alokasi khusus. Fakta menunjukkan dana transfer terus mengalami peningkatan namun kemiskinan relatif stagnan, ada anggapan bahwa dana yang dialokasikan tidak efisien. Oleh sebab itu, masalah penelitian yang pertama adalah bagaimana pengaruh dana desa dan dana alokasi khusus variabel bebas terhadap kemiskinan secara spasial?.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong adanya *elite capture* yang menimbulkan peluang dominasi kontrol elit lokal. Keadaan tersebut menghasilkan informasi yang tidak utuh atau *asymetrics information* sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi dan berujung pada inefisiensi kelembagaan. Masalah

penelitian yang kedua adalah bagaimana peran kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan secara spasial.
2. Menganalisis peran kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan di Perdesaan.

II. LITERATUR REVIEW

II.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menjadi stimulus bagi sektor lain untuk berkembang, hal ini dapat dilihat dari tulisan Keynes berjudul *The General Theory*. Pada intinya perekonomian (Y) tergantung pada *aggregate demand*. Secara agregasi permintaan dalam jangka pendek merupakan hasil pengabungan dari rumah tangga (C), perusahaan (I), kegiatan ekonomi pemerintah (G). Bila dilihat dari persamaan, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan (Mankiw 2006). Secara sederhana formulasi keseimbangan Keynesian adalah sebagai berikut:

$$Y \approx AD = C + I + G + (X - M)$$

Peran pemerintah diperlukan dalam perekonomian karena mekanisme pasar tidak selalu mampu membuat perekonomian menjadi efisien. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989) pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu: 1) fungsi alokasi, dimana pemerintah berupaya mengalokasikan dana untuk penyediaan barang publik atau alokasi sumber daya yang dipergunakan sebagai barang publik dan bagaimana mengalokasikannya. 2) fungsi distribusi, pemerintah melakukan distribusi guna menciptakan pemerataan dan keadilan. Distribusi pendapatan dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan pajak dan transfer. Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar distribusi kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pemerataan tanpa mengabaikan keadilan bagi daerah penghasil. 3). Fungsi Stabilisasi, pemerintah menjamin stabilitas ekonomi, mempertahankan tingkat kesempatan kerja dan menjaga keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks dana transfer, seyogyanya kebijakan anggaran diarahkan pada program *pro-poor, pro-growth, pro-job*.

II.1.1 Dana Desa

Penggunaan dana desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang persentase belanja desa dalam APBDESA. Tujuan dana desa adalah: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Implementasi kegiatan dana desa diarahkan untuk dilaksanakan dengan cara swakelola. Konsep swakelola ditujukan untuk agar dapat meningkatkan daya masyarakat desa yang tergolong dalam kelompok masyarakat miskin. Salah satu program swakelola adalah program padat karya dan *cash for work*. Program padat karya dapat dilakukan melalui: (1) pembuatan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana, (2) pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, (3) kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sementara itu, program *cash for work* bertujuan mencegah terjadinya kebocoran wilayah (*regional leakages*), dana desa diharapkan tidak mengalir ke luar desa sehingga dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi pembangunan desa. Bentuk kegiatan dalam *cash for work* misalnya pembangunan sarana dan prasarana seperti embung, jalan dan saluran irigasi desa.

II.2 Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain: pendapatan per kapita, distribusi pendapatan

nasional, tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Kuncoro 2000).

Pendekatan kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS menyimpulkan bahwa bila penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, maka tergolong penduduk miskin. Garis kemiskinan Indonesia pada September 2015 sebesar Rp 8.398,1 per kapita per hari atau Rp 251.943 per kapita per bulan. Sementara itu, Provinsi Banten menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 8.350,7 per kapita per hari atau Rp 250.522 per kapita per bulan. Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* berdasarkan pendapatan per kapita, bila kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah setara dengan USD \$2 per kapita per hari.

Basis data terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K yaitu kemiskinan mikro, TNP2K mengklasifikasikan 40% masyarakat berpenghasilan terbawah, masyarakat yang pendapatan per kapita per bulan $\leq 0,8\text{GK}$ maka dikategorikan sangat miskin (kronis) dan berada pada desil I . Sementara itu, bila $0,8\text{GK} \leq$ pendapatan per kapita per bulan $\leq \text{GK}$ maka tergolong miskin (desil II).

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: kemiskinan absolut, relatif dan kultural. Kemiskinan absolut dapat diartikan apabila pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum yang telah ditentukan. Kemiskinan relatif biasanya berkaitan dengan proporsi distribusi pendapatan yang tidak merata. Sementara itu kemiskinan kultural lebih disebabkan oleh pengaruh budaya misalnya budaya malas, sikap “nerimo”, kurang memiliki etos kerja dan rendahnya motivasi (*World Bank* 2008).

Berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan, Nurse mengungkapkan adanya lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Gambar 4 menunjukkan keterkaitan antara kekurangan modal yang menyebabkan produktivitas rendah, rendahnya produktivitas berdampak pada pendapatan yang rendah, tabungan juga rendah dan investasi rendah. Di sisi lain, kekurangan investasi SDM berdampak ke penguasaan IPTEK yang rendah dan produktivitas

turun, hal tersebut memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan (Sagir 2009).



Sumber: Sagir 2009

Gambar 4 Lingkaran kemiskinan

II.3 Kelembagaan

Kelembagaan diartikan sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam masyarakat (North 1992) baik aturan formal maupun non formal (Kasper *et al.* 2012). Aturan main tersebut mencakup moral, etika dan norma yang ada dalam masyarakat. Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian dalam interaksi manusia melalui penciptaannya pada perilaku. Sejalan dengan itu, Boediono (2016) menyatakan setiap institusi publik pada hakikatnya terdiri atas dua unsur pokok yaitu: (1) satu set aturan main, (2) manusia-manusia yang melaksanakan aturan main, artinya kinerja suatu institusi ditentukan oleh kualitas aturan mainnya dan kualitas manusianya.

Sementara itu, kelembagaan menurut Yustika (2013) dapat diklasifikasikan dalam dua hal yaitu berkaitan dengan proses dan tujuan. Bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Bila berkaitan dengan tujuan maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya.

Kelembagaan menurut Williamson (2000) memiliki empat tingkatan, satu sama lainnya berhubungan timbal balik. Aras pertama berhubungan dengan teori

sosial merupakan institusi formal yang ada dalam masyarakat seperti adat, tradisi dan norma. Aras kedua berhubungan dengan *property right* merupakan aturan main, kemudian aras ketiga yaitu biaya transaksi yang terdiri atas pelaksanaan kontrak, pengaturan dan penegakan. Aras keempat yaitu *agency theory* yang terkait dengan alokasi sumber daya alam dan manusia.

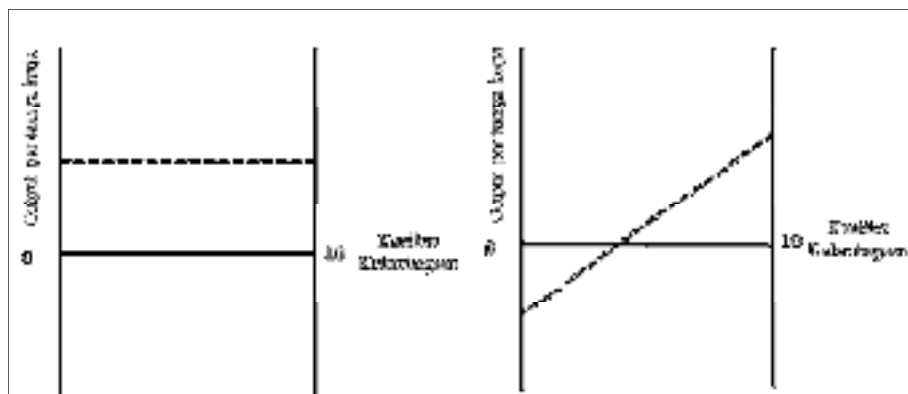
Besaran biaya transaksi terjadi karena adanya penyimpangan dalam bentuk: (1) penyimpangan atas lemahnya jaminan hak dan kepemilikan, (2) penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam, (3) penyimpangan intertemporal, penyimpangan ini dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang, penyalahgunaan strategis dan (4) penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kelembagaan. Bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut muncul karena adanya informasi yang tidak sempurna (*asymetric information*) (Yustika 2013).

Secara lugas Yustika (2013) menjelaskan determinan biaya transaksi yaitu atribut perilaku dari aktor (rasionalitas terbatas dan oportunistik), sifat atribut transaksi (spesifikasi aset, ketidakpastian, frekuensi), struktur tata kelola kegiatan ekonomi (pasar, hybrid, hirarki, pengadilan, regulasi, birokrasi) dan faktor yang berdekatan dengan lingkungan kelembagaan (hak milik dan kontrak, budaya).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, biaya transaksi dapat dilihat dari besarnya biaya pelayanan yang muncul dalam proses pelayanan publik. Biaya transaksi muncul karena adanya tiga faktor yaitu rasionalitas terbatas, oportunistik dan spesifikasi aset. Yustika (2013) menyatakan bahwa desentralisasi sebagai suatu strategi ekonomi akan berjalan bila faktor kelembagaannya diurus dengan baik. Pada sebuah negara yang sedang melakukan proses reformasi, desentralisasi ekonomi bisa dianggap sebagai kelembagaan itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai desentralisasi sebagai *rule of the game* pemerintah lokal untuk menangani perekonomian daerah.

Perubahan kelembagaan diperlukan karena dinamika pembangunan tidak dengan sendirinya menciptakan dasar-dasar kelembagaan (Diehl 1998). Pada level mikro dimana target yang dicapai adanya efisiensi, desain kelembagaan formalnya perubahan hukum mengenai hak kepemilikan sedangkan pada aras makro harus

terdapat peraturan yang tegas. Tentu saja target dari perubahan kelembagaan adalah menurunnya biaya transaksi. Sementara itu, kelembagaan informal pada level mikro, meso maupun makro turut berkontribusi mencapai tujuan perubahan kelembagaan formal .



Sumber: Hall *et al.* 2010

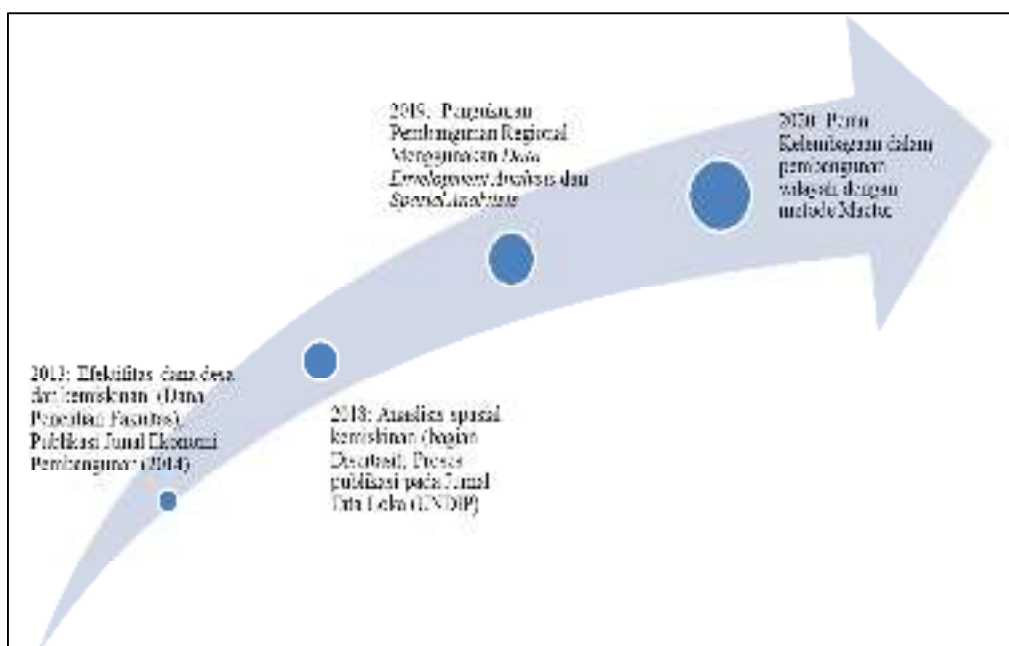
Gambar 5 Peran institusi dalam menciptakan marginal efek modal terhadap output per tenaga kerja

Kelembagaan menjadi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dimana didalamnya terdapat *property* dan *contract rights*. Kedua hal ini diukur melalui indikator regulasi, risiko pengambilalihan, penolakan kontrak oleh pemerintah, korupsi dan kualitas birokrasi. Berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horizontal, namun juga menjadi peluang terjadinya saluran baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, lobi-lobi dan suap atau gratifikasi. Selain itu, salah satu risiko dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemungkinan terjadinya kontrol penuh oleh elit daerah (Jaya 2010).

II.5 Peta Jalan

Studi ini merujuk peta jalan yang telah dilakukan pada tahun 2013 (Dana Penelitian Fakultas) dan 2018 (Disertasi) serta penelitian tahun 2019 (Dana Penelitian Universitas). Secara umum hasil studi sebelumnya menemukan bahwa intervensi pemerintah melalui dana desa terhadap kemiskinan di daerah, akan daerah direspon dengan capaian yang beragam oleh daerah sehingga kebijakan yang diambil seharusnya lebih memperhatikan aspek spasial. Salah satu point

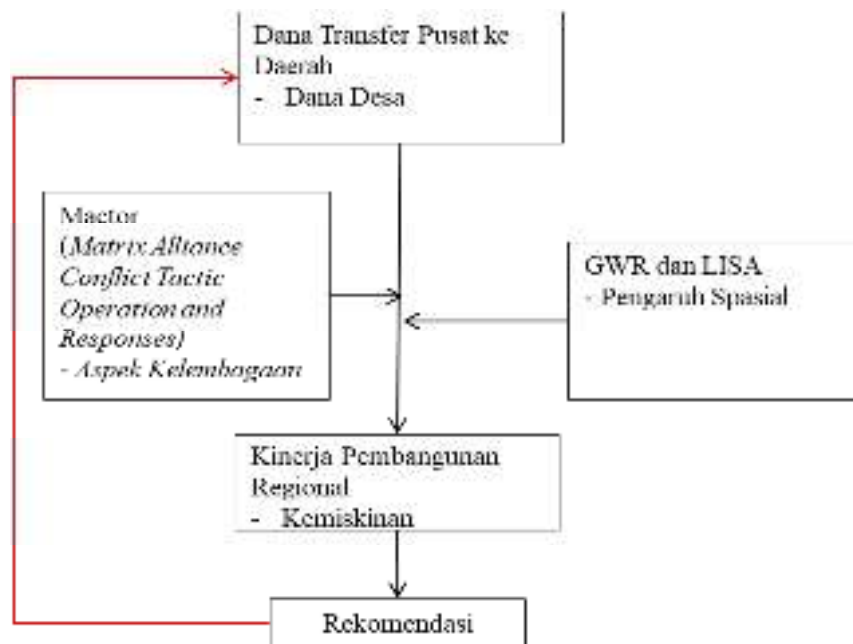
rekomendasi yang diajukan yaitu melakukan pemetaan spasial terhadap kemiskinan pada unit terkecil (kecamatan). Pemetaan spasial sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan penganggaran secara tetamtik. Penganggaran yang baik bila didukung oleh aspek kelembagaan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang aspek kelembagaan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di daerah.



Gambar 6 Peta Jalan Penelitian

II.6 Kerangka Pikir

Selama ini pemerintah telah mengalokasikan dana transfer ke daerah dan desa melalui dana desa. Namun faktanya kinerja pembangunan regional masih relatif stagnan, terutama penurunan tingkat kemiskinan yang turun tidak lebih dari dua persen selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran secara spasial untuk melihat pengaruh dana desa variabel disetiap kecamatan di kabupaten yang menjadi sampel. Pengaruh variabel disetiap regional kabupaten/kota akan diukur menggunakan model *geographically weighted regression* (GWR). Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis aspek kelembagaan yang ada guna melihat peran antar aktor yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan (Gambar 7).



Gambar 7 Kerangka pikir penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan mengkaji tentang dana desa dan kelembagaan Ekonomi Perdesaan di Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu penelitian akan melihat pengaruh anggaran secara spasial. Studi ini akan dilakukan di 2 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musirawas Utara. Pemilihan daerah kajian didasarkan pada 1). Kabupaten Musirawas Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan, 2) Musi Banyuasin merupakan wilayah yang memiliki PDRB yang besar namun angka kemiskinan sangat tinggi.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data lapang berupa hasil wawancara yang digunakan untuk melihat peran kelembagaan, dan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan data spasial dasar diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemetaan

tingkat kemiskinan dilakukan pada level kecamatan dengan bantuan *software* GIS 10.3. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial. Variabel yang digunakan untuk melihat pola spasial kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu dana desa. Data kemiskinan diambil pada tahun 2017 (hasil *update* data BPS 2015) sedangkan data dana desa dan alokasi pada tahun 2016. Penggunaan tahun data yang berbeda dengan pertimbangan adanya *time lag* untuk kemiskinan. Penggunaan dana desa dan dana alokasi desa tidak berdampak langsung pada tahun yang sama namun berpengaruh pada tahun setelahnya.

III.3 Teknik Analisis

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara spasial akan digunakan metode *geographically weighted regression* (GWR). Penggunaan model GWR untuk melihat adanya pengaruh heterogenitas wilayah. Variabel dana desa di kabupaten ke- i memiliki mungkin memiliki pengaruh yang berbeda di wilayah kabupaten/kota lainnya. Model umum GWR kemiskinan adalah sebagai berikut (Anselin 1988):

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \varepsilon_i \quad (1)$$

y_i : nilai observasi variabel respon pada kecamatan ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)

x_{ik} : nilai observasi variabel prediktor k pada kecamatan ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)

(u_i, v_i) : titik koordinat (lintang bujur) pada suatu kecamatan ke i .

$\beta_k(u_i, v_i)$: parameter regresi untuk setiap kecamatan ke- i

ε_i : *error* yang diasumsikan IIDN (identik, independen, dan berdistribusi normal) dengan *mean* nol dan varians konstan σ^2

Estimasi parameter pada masing-masing kecamatan ke- i pada persamaan 1 melalui *Weighted Least Square* (WLS) adalah sebagai berikut:

$$\hat{\beta}(i) = (\mathbf{X}^T \mathbf{W}(i) \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{W}(i) \mathbf{y} \quad (2)$$

dimana X =matriks data dari variabel independen, y = vektor variabel dependen, dan $W(i)$ =matriks pembobot

Identifikasi kemiskinan dengan menggunakan model GWR yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_1(u_i, v_i)X_1 + \varepsilon \quad (3)$$

Berdasarkan formula pada persamaan 8 maka analisis model GWR untuk melihat pola spasial kemiskinan di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$Pov_i = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_{1i}(u_i, v_i)DD_i + \varepsilon_i \quad (4)$$

Dimana:

Miskin_i = persentase penduduk miskin di kecamatan ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$) tahun 2018

(u_i, v_i) = titik koordinat (lintang bujur) pada kecamatan i

$\beta_i(u_i, v_i)$ = parameter regresi untuk setiap kecamatan ke- i

ε_i = *error* yang diasumsikan IIDN (identik, independen, dan berdistribusi normal dengan *mean* nol dan varians konstan σ^2)

DD_i = dana desa (juta rupiah) di kecamatan ke- i tahun 2016

Selain itu untuk melihat peran aktor dalam pengentasan kemiskinan di wilayah sampel akan digunakan model MACTOR dengan formulas sebagai berikut:

$$MIDI_{a,b} = MID_{a,b} + \sum_c (\min(MID_{a,c}, MID_{c,b})) \quad (5)$$

Persamaan 39 menunjukkan bahwa penentuan pengaruh tidak langsung diperoleh dari minimum dua pengaruh langsung yang dihasilkan dari nilai penjumlahan pengaruh langsung yang tertimbang dan semua nilai pengaruh langsung. Matriks ini memungkinkan untuk menentukan pengaruh secara umum maupun keterkaitan koefisien. Pengaruh secara umum merupakan penjumlahan masing-masing baris dan kolom dari matriks MIDI (persamaan 6 dan 7).

$$I_a = \sum_b (MIDI_{a,b}) - MIDI_{a,a} \quad (6)$$

$$D_a = \sum_b (MIDI_{b,a}) - MIDI_{a,a} \quad (7)$$

Dimana, I_a dan D_a adalah pengaruh tidak langsung dan langsung dari aktor A, yang diperoleh dari matriks pengaruh langsung dan tidak langsung (MIDI).

Nilai-nilai pada persamaan 6 dan 7 kemudian dibandingkan dengan pengaruh aktor-aktor lain, maka kekuatan masing-masing aktor dapat dihitung melalui persamaan 8.

$$r_a = \left(\frac{(I_a - \text{MIDI}_{a,a})}{\sum_b (I_a)} \right) \cdot \left(\frac{I_a}{(I_a + D_a)} \right) \quad (8)$$

Setelah diketahui hubungan (koefisien) antar aktor seperti persamaan 8, hubungan antara aktor dan objektif diterapkan dengan cara yang sama. Hal ini akan terlihat dari pada matriks 3MAO pada persamaan 9, dalam matriks tersebut terlihat posisi suatu aktor terhadap suatu isu.

$$3\text{MAO}_{a,i} = 2\text{MAO}_{a,i} \cdot r_a \quad (9)$$

Sebagian besar analisis MACTOR bertolak dari persamaan 9, sejumlah nilai penting secara langsung diambil dari matriks 3MAO. Persamaan 10 menunjukkan objektif yang mendorong aktor bertindak reaktif. Sementara itu, persamaan 11 menunjukkan berapa banyak aktor yang mendukung (*agreement*) suatu isu sedangkan persamaan 12 menunjukkan berapa banyak aktor yang tidak setuju (*disagreement*) terhadap objektif yang ingin dicapai.

$$\text{Mob}_a = \sum_i |3\text{MAO}_{a,i}| \quad (10)$$

$$\text{Ag}_i = \sum_a (3\text{MAO}_{a,i} (3\text{MAO}_{a,i} > 0)) \quad (11)$$

$$\text{Disag}_i = \sum_a (3\text{MAO}_{a,i} (3\text{MAO}_{a,i} < 0)) \quad (12)$$

Matriks 3MAO tersebut menjadi dasar apakah suatu objektif tersebut mendapat dukungan dari aktor. Dalam mencapai objektif aktor dapat bersinergi atau sebaliknya yang tercermin dari nilai *objective convergence between actor* (3CAA) pada persamaan 12 dan nilai *objective divergence between actor* (3DAA) pada persamaan 13.

$$3\text{CAA}_{a,b} = \frac{1}{2} \sum_i ((|3\text{MAO}_{a,i}| + |3\text{MAO}_{b,i}|) \cdot (3\text{MAO}_{a,i} \cdot 3\text{MAO}_{b,i} > 0)) \quad (12)$$

$$3\text{DAA}_{a,b} = \frac{1}{2} \sum_i ((|3\text{MAO}_{a,i}| + |3\text{MAO}_{b,i}|) \cdot (3\text{MAO}_{a,i} \cdot 3\text{MAO}_{b,i} < 0)) \quad (13)$$

Aktor dapat diajak berkerjasama atau berkonflik (ambivalen), nilai koefisien ambivalensi yang tinggi mengindikasikan semakin besar kemungkinan untuk bekerjasama atau sebaliknya (persamaan 14).

$$3EQ_i = 1 - \left[\frac{(\sum_k |3CAA_{i,k}| - |3DAA_{i,k}|)}{(\sum_k |3CAA_{i,k}| + |3DAA_{i,k}|)} \right] \quad (14)$$

Hasil output dari metode MACTOR juga menunjukkan aktor yang dapat diajak bekerjasama, persetujuan dan ketidaksetujuan aktor terhadap objektif, konvergensi dan divergensi antar aktor, reaksi aktor dan objek yang mendorongnya, ambivalensi aktor, kedekatan aktor dengan aktor lainnya dan kedekatan aktor dengan objektif yang ingin dicapai.

Pengaruh	Dominant actor	Relay Actors
	Autonomous Actors	Dominated Actors
	Ketergantungan	

Gambar 1 Pengaruh dan tingkat ketergantungan aktor dalam sinkronisasi program kemiskinan

III.4. Definisi Operasional Variabel

1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar hidup minimum yang telah ditetapkan BPS.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan. Dalam penelitian digunakan total akumulasi dana desa di seluruh kecamatan.
3. Analisis spasial kemiskinan adalah pendekatan yang menggunakan metode statistik untuk menyederhanakan pola-pola spasial (pola spasial kemiskinan).
4. Kelembagaan adalah aturan main lingkungan institusi dan biaya transaksi. Lingkungan institusi terdiri atas aturan main (perundang-undangan) dan birokrasi yang difokuskan pada organisasi perangkat daerah.

IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Jenis Luaran	Deskripsi Luaran	Tahun Dicapai
Jurnal	Jurnal internasional beriptasi Terindeks Scopus	2020
Proceeding	Sertifikat Sebagai Penyaji Pada Seminar Internasional Bereputasi	2020
Bahan Ajar	Menjadi Bahan Ajar Ekonomi Regional, dan Ekonomi Keuangan Daerah	2020

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	KETERANGAN	SATUAN	Volume		HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
			Bulan/Hari/Kali	Orang/Kali		
A	Honorarium					
1	Pengumpul Data	Orang/jam	2	75	40.000	6.000.000
2	Pengolah Data	Orang/jam	1	75	25.000	1.875.000
3	Penganalisis data	Orang/jam	2	75	50.000	7.500.000
Total Honorarium (A)						15.375.000
B	Belanja Non Operasional					
1	Konsumsi rapat (2 bulan sekali)	orang/kegiatan	20	7	50.000	7.000.000
2	Sewa Printer	Unit	1	1	650.000	650.000
3	Fotokopi dan Jilid Proposal	Buah	5	1	50.000	250.000
4	Fotokopi dan Jilid Revisi Proposal	Buah	5	1	50.000	250.000
5	Fotokopi dan Jilid Laporan Kemajuan	Buah	5	1	50.000	250.000
6	Fotokopi dan Jilid Laporan Akhir	Buah	5	1	50.000	250.000
7	Seminar Hasil Penelitian	Kegiatan	1	1	500.000	500.000
8	Penggantian Uang Pulsa	Orang/Bulan	5	4	100.000	2.000.000
9	Biaya Translate	Paket	30	1	250.000	7.500.000
10	Biaya <i>Proofreading</i>	Paket	20	1	400.000	8.000.000
11	Foto Copy Literatur	Paket	5	2	400.000	4.000.000
12	Submitt Jurnal	Paket	1	1	9.000.000	9.000.000
13	Seminar Internasional	Paket	1	1	5.000.000	5.000.000
Total Belanja Non Operasional (B)						44.650.000
C	Belanja Barang					
1	Kertas HVS A4 80gr	Rim	10	1	45.000	450.000
2	Tinta Printer	Buah	3	1	325.000	975.000
3	Flash Disk 8 Gb	Buah	2	1	70.000	140.000
4	CD RW 700 MB	Buah	4	1	11.000	44.000
5	Pena Bold Point	Buah	10	1	8.000	80.000
6	Map Plastik	Buah	15	1	5.000	75.000
Total Biaya Barang (C)						1.764.000

D	Belanja Perjalanan					
1	Sewa Penginapan	Hari/Unit	4	3	250.000	3.000.000
2	Sewa Kendaraan (termasuk bensin)	Hari/Unit	7	2	650.000	9.100.000
3	Estimasi Pajak (PPh 21,22,23)	Paket	1	1	650.000	650.000
Total Belanja Sewa dan Peralatan (D)						12.750.000
TOTAL A+B+C+D						74.539.000

VI. JADWAL

No	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Pembahasan Draft Awal	X					
2	Observasi Data	X	X				
3	Pengambilan Data			XX			
4	Pengolahan Data	X	X	XXX	X		
5	Penyusunan Draft Penelitian			X	XX	X	
6	Perbaikan Laporan Final					XX	
7	Paparan Hasil Penelitian						
8	Penyerahan laporan Akhir						XX
9	Registerasi Seminar dan Submit Jurnal						XX

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu D, Robinson JA. 2012. *Why Nations Fail*. New York (US): Crown Publishers.
- Anselin L. 1988. *Spatial Econometrics: Method and Models*. Dordrecht (NL) Kluwer: Academic Publisher.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia. BPS. Jakarta. 2019
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*. Bandung, Indonesia (ID): Mizan Pustaka.
- Demurger S, Jeffrey DS, Wing TW, Shumming Bao, Gene C, Andrew M. 2001. Geography, Economic Policy dan Regional Development in China. *Forthcoming in Asian Economic Papers*. 1(1): 1-61.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, 2019
- Diehl M. 1998. The role of institutions in the economic transition process: the reform of state-owned enterprises in Vietnam. *Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition*. 2: 49-59
- Jaya WK. 2010. Kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan. *Makalah*. 1-19.
- Kasper W, Streit ME, Boettke PJ. 2012. Institutional Economics Property, Competition, Policies.
- KPPOD. 2011. *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011*. Jakarta (ID): KPPOD dan The Asia Foundation.
- Mankiw N. 2006. *Macroeconomics. Sixth Edition*. New York: Worth Publishers.
- Musgrave R, Musgrave P. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York (US): McGraw-Hill.
- North DC. 1992. Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance. San Francisco, Calif (US). ICS Press
- Sagir S. 2009. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia*. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Grup.
- Yustika AE. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga
- Williamson OE. 2000. The new institutional economics: Taking stock looking ahead. *Journal of Economic Literature*. 38(September)(3): 595-613.

WEF [World Economic Forum]. 2015. The Global Competitiveness Report 2014-2015.
Report. Geneva, Swiss: World Economic Forum.